

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran perempuan dalam kontestasi politik di Indonesia, baik itu pemilihan umum (pemilu) ataupun pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di daerah-daerah semakin terbuka dan berpeluang. Kehadiran perempuan dalam kontestasi politik nasional tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kaum perempuan telah ikut serta dalam meramaikan dan mewarnai dinamika politik di Indonesia. Daerah-daerah di Indonesia pada saat pemilukada berlangsung dapat dilihat beberapa nama dan gambar tokoh perempuan muncul terpampang di ruang-ruang publik.

Fenomena ini merupakan kecenderungan yang akan terus menguat. Sebagai hasil dari terus menguatnya gerakan dan tuntutan, serta meluasnya kesadaran tentang kesetaraan gender atau pentingnya partisipasi perempuan dalam politik. Ruang dan jabatan politik kian terbuka bagi siapa saja termasuk kaum perempuan itu sendiri, tidak lagi diperuntukkan secara eksklusif bagi laki-laki, dan tidak boleh ditabukan bagi perempuan. Hak politik merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang itu laki-laki ataupun perempuan.

Perempuan berhak dan berpotensi memberikan kontribusi nyata di dalam politik. Namun demikian, tetap saja fenomena makin banyaknya sosok perempuan dalam kontestasi politik di daerah-daerah masih menjadi pro dan kontra sehingga keterlibatan perempuan masih saja mengundang diskusi, perdebatan, dan tak jarang masih menyisakan keraguan.

Pemilukada merupakan arena kontestasi politik dengan kompetisi yang melibatkan beberapa pasangan kandidat dan pemenangan dalam pemilukada ditentukan dengan suara terbanyak oleh pemilih. Kompetisi yang terjadi boleh jadi dipengaruhi oleh kapasitas figur masing-masing pasangan calon kandidat artinya meskipun aturan pencalonan minimal 15 % kursi atau suara hasil legislatif. Ketentuan tersebut sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 59 ayat 2 UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa “partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi DPRD atau 15 % dari akumulasi suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD”. Namun yang lebih dominan yaitu figur kandidat tersebut seperti ketokohan, popularitas dan moralitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan.

Hal ini dapat menjadi sangat penting dalam suatu kontestasi politik, dimana seseorang hanya dengan mengandalkan popularitas dan figuritasnya kemudian dianggap memiliki kemampuan untuk ikut bersaing dalam pemilukada. Modal ini merupakan dasar relasi dan kepercayaan (*trust*) yang dimiliki oleh pasangan calon dari konstituen yang telah memilihnya. Modalitas dalam kontestasi politik selain peran figur atau modalitas kandidat, juga sangat ditentukan oleh beberapa modalitas lainnya seperti peran dukungan partai politik, elit politik, dan tim pemenangan, adapun modal lainnya yaitu kesanggupan dana politik.

Dalam kontestasi pemilukada, dana politik sendiri juga memiliki posisi yang sangat menentukan strategi pemenangan yang dijalankan oleh kandidat dan tim pemenangannya. Modalitas ini sangat diperlukan untuk membiayai semua

tahapan pada saat pemilukada berlangsung oleh kandidat dan tim pemenangan. Selain itu juga peran modal politik dapat dipastikan bahwa dari fungsi partai juga tidak terlepas sebagai gerbang masuk bagi para calon terutama bukan kader dari partai politik.

Sahdan dan Haboddin (2009), bahwa kandidat yang dicalonkan oleh partai (koalisi partai), dimana dalam melakukan rekrutmen kandidat, partai politik hendaknya mempertimbangkan beberapa aspek antara lain adalah sebagai berikut:

“kualitas kandidat, popularitas kandidat, kompetensi kandidat, kapabilitas kandidat, termasuk di dalamnya adalah moralitas kandidat yang diusung oleh partai politik dengan kata lain bahwa modalitas pun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena saling berkaitan satu sama lain” (Sahdan dan Haboddin, 2009).

Kabupaten Luwu Utara juga telah menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah. Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara melalui komisi pemilihan umum daerah (KPUD) Kabupaten Luwu Utara, menetapkan pemungutan suara pada hari Rabu 9 Desember 2015. pemilihan umum ini diikuti 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati yaitu Indah Putri Indriani berpasangan dengan Muh.Thahar Rum dan Arifin Junaidi berpasangan dengan Andi Abdullah Rahim.

Arena kontestasi pemilukada di Kabupaten Luwu Utara telah melahirkan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih yang baru, yaitu pasangan Indah Putri Indriani dan Muh.Thahar Rum, yang menjadi perhatian adalah Indah Putri Indriani, selain terpilih sebagai Bupati Luwu Utara pada pemilukada 2015, Indah Putri Indriani juga merupakan bupati perempuan pertama di Sulawesi Selatan. Perempuan yang masih tergolong relatif muda pada saat keikutsertaannya dalam

sebuah kontestasi, Indah Putri Indriani yang masih berusia 39 tahun ini berhasil mengungguli bupati petahana Arifin Junaidi dalam pemilukada serentak 9 desember 2015 lalu, dengan selisih suara 12.210 suara. Adapun hasil perolehan suara pada Pemilukada Luwu Utara 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Hasil Perolehan Suara pada Pemilukada di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015

Nomor Urut	Nama pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati	Partai Pendukung	Hasil perolehan Suara	Keterangan
1	Indah Putri Indriani dan Muh.Thahar Rum	1. Gerindra 2. Demokrat 3. Nasdem 4. PDIP	90.824 Suara (53,60%)	selisih suara 12.210 suara
2	Arifin Junaidi dan Andi Abdullah Rahim	1. Golkar 2. Hanura, 3. PKB 4. PKS 5. PAN	78.614 Suara (46,40%)	

Sumber: Diolah oleh Penulis dari data KPUD Kabupaten Luwu utara Tahun 2015

Perolehan suara yang sangat signifikan terlihat begitu jelas dalam Pemilukada di Kabupaten Luwu Utara, dimana pasangan Indah Putri Indriani dan Muh.Thahar Rum berada di urutan pertama yang berhasil memperoleh suara terbanyak yaitu 90.824 Suara (53,60%), sedangkan Arifin Junaidi dan Andi Abdullah Rahim memperoleh 78.614 Suara (46,40%).

Alumni Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Luwu Utara periode 2010-2015 ini dicalonkan sebagai bupati oleh empat partai pendukung, yakni Partai Gerindra, PDIP, Nasdem dan Demokrat. Indah Putri Indriani berkiprah di dunia politik dimulai sejak umur 33

tahun dengan pengalaman pernah menjadi Tenaga Ahli Komisi II DPR RI bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. (sumber: Detik news).

Kemenangan pasangan Indah Putri Indriani dan Thahar Rum dalam pemilukada ini tidak semata-mata diperoleh melalui jalan pintas. Tetapi untuk memperoleh capaian kemenangan ini Indah Putri Indriani juga memerlukan beberapa modal seperti, modal sosial yakni adanya pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat yang memilih. Hal ini menunjukkan bahwa ketokohan atau popularitas Indah Putri Indriani sangat mempengaruhi dinamika tingkat dukungan dari masyarakat, terlebih jika kandidat tersebut merupakan figur yang dianggap terpancang atau bersahaja serta mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Menarik untuk mencermati figuritas seorang Indah Putri Indriani dalam memperoleh suara maksimal dalam Pemilukada di Kabupaten Luwu Utara 2015. Dengan latar belakang sebagai seorang akademisi, pernah memiliki pengalaman menjadi staf pengajar program S1 & Ekstensi FISIP UI, dosen Pascasarjana Ilmu Politik UI, dosen FISIP Universitas Bung Karno dan dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Berbeda dengan kandidat lainnya yang memiliki latar belakang birokrat dan elit politik yang cukup terkenal di kabupaten Luwu Utara seperti calon bupati lainnya yang merupakan calon pertahana yaitu Arifin Junaidi, dimana penulis menggambarkan calon bupati lainnya tersebut sebagai politisi yang sementara membangun dinasti politiknya, melalui istrinya Rafika Said, berhasil menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Luwu Utara melalui Partai Golkar. Sementara anaknya, Muhammad Rizha, berhasil terpilih menjadi Anggota DPRD Sulawesi

Selatan. Adiknya, Mustaming Makkasau, juga telah memastikan satu kursi di DPRD kabupaten Luwu Utara. (sumber: metronews.com).

Pierre Bourdieu (1986), dalam bukunya *The Forms of Capital* membedakan tiga bentuk modal, yaitu modal ekonomi, modal budaya dan modal sosial. Beberapa ahli lain (lihat tulisan Hick dan Misra: 1993, Jamaludin Ancok :2003, JS Mill dalam Bunga: 2008, Suharto: 2011) ada yang membagi modalitas dalam konteks pemilu ke dalam beberapa bagian. Modal itu dibagi menjadi tiga katagori utama, yaitu modal politik, modal ekonomi, dan modal sosial.

Modalitas politik yaitu dukungan terhadap bakal calon yang diperoleh dari partai politik atau gabungan beberapa partai politik yang akan mengusung dalam pemilihan umum kepala daerah. Modalitas ekonomi atau modal finansial, yaitu dukungan berupa uang atau harta benda yang akan menopangnya sebagai bakal calon atau calon untuk mendanai *cost politic* (biaya politiknya). Modal sosial yaitu kedekatan calon kepada masyarakat *voters* (pemilih), yang akan berpartisipasi untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan umum kepala daerah.

Modalitas sosial memiliki makna yang sangat penting bahkan tidak kala pentingnya dibandingkan dengan modalitas yang lainnya. Memiliki modal sosial yang cukup tinggi, para kandidat tidak hanya dikenal oleh para pemilih saja. Akan tetapi, melalui pengenalan-pengenalan tersebut, lebih-lebih pengenalan secara fisik dan sosial secara dekat, para calon pemilih juga bisa melakukan penilaian apakah pasangan yang ada itu layak untuk dipilih atau tidak.

Seorang calon dianggap memiliki modal sosial yang tinggi, berarti calon tersebut tidak hanya dikenal oleh masyarakat melainkan juga diberi kepercayaan

besar oleh masyarakatnya. Selain modal sosial, dalam kontestasi politik termasuk pemilihan umum kepala daerah secara langsung jelas membutuhkan biaya politik yang besar. Modal yang besar itu tidak hanya dipakai untuk membiayai pelaksanaan kampanye saja, tetapi yang tidak kalah pentingnya dapat digunakan untuk membangun sebuah relasi dengan para calon pendukungnya, termasuk diantaranya adalah modal untuk memobilisasi dukungan pada saat menjelang dan berlangsungnya tahapan kampanye.

Modal ekonomi ini memiliki makna yang cukup penting menjadi sebuah penggerak atau mesin politik yang akan dipakai. Dalam musim kampanye tentu membutuhkan uang yang cukup besar untuk pembiayaan beberapa kebutuhan seperti mencetak beberapa poster dan spanduk, membayar iklan, konsumsi ataupun menyewa kendaraan untuk mengangkut pendukung, dan berbagai kebutuhan lainnya, termasuk untuk pengamanan.

Indah Putri Indriani juga sangat mempengaruhi dinamika partai politik, diketahui beberapa bulan jelang pemilukada serentak, DPP Gerindra mencopot Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Luwu Utara yaitu Arsyad Kasmar. DPP telah menunjuk pengganti Asyad Kasmar yaitu Wakil Bupati Luwu Utara yakni Indah Putri Indriani. Arsyad Kasmar diganti setelah hijrah ke Partai Golkar kubu Agung Laksono. Kepindahan Arsyad Kasmar dari Partai Gerindra ke Partai Golkar tersebut, karena rasa kecewa lantaran DPP Gerindra tidak mengakomodasinya sebagai kandidat calon bupati pada Pemilukada Luwu Utara 2015. Hal ini menunjukkan bahwa kepopuleran dan ketokohan Indah Putri Indriani juga sangat mempengaruhi dinamika partai politik. (sumber: masamba news.com)

Mencermati keberhasilan Indah Putri Indriani dalam pemenangan Pemilukada Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 dengan perolehan suara yang signifikan, menarik dielaborasi adalah bagaimana peran modalitas dalam pemenangan pasangan Indah Putri Indriani dan Thahar Rum pada Pemilukada di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam kemenangan Indah Putri Indriani dan Thahar Rum, pengaruh modal sangat besar. Pada titik ini penulis memilih untuk memfokuskan arah pada modalitas yang dominan dimiliki oleh bupati perempuan pertama di Sulawesi Selatan tersebut yaitu Indah Putri Indriani.

Ada beberapa pertimbangan penting yang mendasar selain dari pada menjadi bupati perempuan pertama di Sulawesi Selatan diantaranya juga, pertama; Indah Putri Indriani menjadi sosok sentral yang telah lama dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Utara, sebagai wakil bupati yang merakyat (modal sosial). Kedua; Indah Putri Indriani memiliki Latar Belakang Pendidikan (modal budaya). Ketiga; Indah Putri Indriani memiliki kekuatan *financial* (modal capital/ekonomi). Keempat; sebagai seorang ketua partai, Indah Putri Indriani juga didukung oleh sumber daya partai yang besar (modal politik).

Sebagai catatan penting bahwa penulis memilih untuk tidak menganalisis faktor wakil bupati (walaupun tidak bisa disangkal bahwa faktor tersebut juga berpengaruh) didasarkan pengalaman Pemilukada di kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2010, Wakil bupati terpilih tahun 2015 yaitu Muhammad Thahar Rum pernah mengikuti Pemilukada tahun 2010 berpasangan dengan Ansar Akib, lalu kemudian gagal menjadi pasangan pemenang dalam Pemilukada tahun 2010 (sumber: KPU Luwu Utara).

Sedangkan pada saat itu, Indah Putri Indriani yang menjadi calon wakil bupati berpasangan dengan Arifin Junaidi berhasil memenangkan Pemilu Pilkada tahun 2010 yang lalu. Sehingga Thahar Rum dianggap memiliki pengaruh lebih kecil dari pada Indah Putri Indriani dalam kemenangan pemilu di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penulis memfokuskan analisis pada modalitas yang dimiliki oleh Indah Putri Indriani. Modalitas tersebut dipilah menjadi empat bagian utama yaitu modal sosial, modal budaya, modal politik dan modal ekonomi.

Dari latar belakang di atas menjadi alasan bagi penulis mengambil judul **“Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 (Studi Kasus : Indah Putri Indriani Sebagai Bupati Terpilih di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam sebuah pertanyaan besar yaitu bagaimana modalitas yang dimiliki oleh Indah Putri Indriani dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015. Pertanyaan tersebut dijabarkan dalam beberapa pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana modalitas Indah Putri Indriani dalam pemilu di Kabupaten Luwu Utara tahun 2015?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dalam kemenangan Indah Putri Indriani dalam Pemilu di Kabupaten Luwu Utara tahun 2015?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui modalitas Indah Putri Indriani dalam pemilukada di Kabupaten Luwu Utara tahun 2015?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung kemenangan Indah Putri Indriani pada Pemilukada di Kabupaten Luwu Utara.

3.2. Manfaat Penelitian

3.2.1. Manfaat Akademis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu politik dan sumbangan pemikiran yang bisa bermanfaat bagi studi politik lokal, yang khusus kaitannya dengan modalitas calon bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.
2. Menjadi referensi bagi peneliti lain dalam mengambil tema yang sama terkait modalitas calon bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.
3. Selain itu juga penelitian ini diharapkan memberikan *khazanah* bagi perkembangan keilmuan utamanya tentang modalitas dalam Pemilihan Umum.

3.2.2. Manfaat Praktis

1. Diharapkan penelitian ini menjadi inspirasi sehingga memahami bahwa kemenangan yang diraih oleh kandidat dalam Pemilukada, tidak bisa diperoleh melalui "jalan pintas" tapi untuk mencapai kemenangan, modalitas yang dimiliki oleh para calon menempati posisi yang sangat penting.

2. Sebagai referensi bagi pelaku politik untuk memahami modalitas yang diperlukan dalam kontestasi politik atau dalam Pemilihan Umum seperti modal sosial, modal politik ataupun modal ekonomi.